



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Peraturan Desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan produk hukum Desa melalui evaluasi Rancangan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengawasan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerta Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang mengatur APBDesa dan Pungutan Desa;
  - b. mengkoordinasikan Camat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa; dan
  - c. menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan hasil klarifikasi Peraturan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Produk Hukum Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 01 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
 PRODUK HUKUM DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kabid. Akuntansi DPKKAD Kab. Bantul 2. Kasi. Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Bantul 3. Kasi. Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul 4. Kasubbag. Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 5. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 6. Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 7. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	1. Agus Sutomo, SH 2. Wahida Asri, SH 3. Ngadinem 4. Ike Kustini Rahayu, SH
6.	Staf Sekretariat	1. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul  2. Staf DPPKAD Kab. Bantul	1. Ninik Slamet Rahayu, SH 2. Payung Alam Firdaus, SH 3. Sutri Prihartini 4. Sokiye 5. Panggung Sutrisna Rusmi Widyaningrum, A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H  
 NIP. 19691231 199603

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd.

SRI SURYA WIDATI